

Kiprah IPSI sebagai Organisasi Pencak Silat Terkemuka di Indonesia, 1948-1997

Suhardinata,* Sri Indrahti

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, S.H. Semarang, Jawa Tengah – Indonesia

*ardikibo58@gmail.com

Abstract

This study aims to explain the development of a national pencak silat organization in Indonesia called the Indonesian Pencak Silat Association (IPSI) and its role to develop Indonesian pencak silat, both in national and international arena. Using historical studies, this study focuses on the IPSI efforts in developing martial arts [pencak silat] in national and international levels. Since the establishment in 1948, IPSI has carried out various programs aimed to develop pencak silat have still conducted through learning and the provision of adequate training facilities. According to the IPSI's efforts, many pencak silat training institutions were united and they developed international for athletes. During the establishment period, nationally, IPSI organized various National Championships to attract high-quality athletes. Meanwhile, internationally, IPSI succeeded to initiating the establishment of Organization of the International Pencak Silat Association (Persilat) together with the representatives from Malaysia, Singapore, and Brunei Darussalam. This association was reached various countries in the world, including the Netherlands, Germany, the United States, Australia, and so on. It shows that pencak silat has become a sport in which increasingly being enjoyed by public. This study also obtain a proof that the period of 1980s and 1990s became the golden age of IPSI as the leading pencak silat organization in Indonesia due to its active participation in invitations, festivals, and competitions, both national and international.

Keywords: Pencak Silat; National Organization; IPSI.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan organisasi nasional pencak silat di Indonesia yang bernama Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) serta peranannya dalam mengembangkan pencak silat Indonesia, baik pada level nasional maupun internasional. Dengan menggunakan kajian sejarah, kajian ini fokus pada upaya IPSI dalam mengembangkan pencak silat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sejak pendirian IPSI pada 1948, berbagai program untuk pengembangan pencak silat Indonesia terus dilakukan melalui pembelajaran maupun penyediaan fasilitas latihan yang memadai. Atas upaya yang telah dilakukan oleh IPSI, perguruan-perguruan silat dapat bersatu dan mengembangkan altet-atlet pencak silat kelas internasional. Pada tingkat nasional, IPSI menyelenggarakan berbagai Kejuaraan Nasional untuk menjaring atlet-atlet pencak silat yang berkualitas. Sementara itu, pada tingkat internasional, Indonesia yang diwakili oleh IPSI, berhasil menginisiasi Persatuan Pencak Silat Antar-Bangsa (Persilat) bersama perwakilan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Perhimpunan ini kemudian semakin menyebar ke berbagai negara di dunia, antara lain Belanda, Jerman, Amerika Serikat, Australia, dan sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa pencak silat merupakan cabang olahraga yang semakin dinikmati. Berdasar pada studi ini juga diperoleh informasi bahwa pada periode 1980-an-1990-an merupakan masa keemasan IPSI sebagai organisasi pencak silat terkemuka di Indonesia karena partisipasi aktifnya dalam invitasi, festival, dan kejuaraan, baik di Indonesia maupun di mancanegara.

Kata Kunci: Pencak Silat; Organisasi Nasional; IPSI.

Pendahuluan

Pencak silat merupakan salah satu seni bela diri dan termasuk bagian dari Kebudayaan Melayu, yang tergolong sebagai kelompok etnis dari berbagai negara di sebagian kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia (Kusuma, 2019, 1). Tidak diketahui secara pasti sejak kapan sebutan pencak dan silat muncul. Di masa lalu, manusia-manusia mengembangkan gerakan-gerakan pencak silat secara spontan mengikuti fenomena-fenomena alami yang diamati melalui kegiatan sehari-hari. Suku-suku yang terisolasi bahkan sanggup menentang alam dan segala bahaya dengan gerakan-gerakan itu. Dalam perkembangan sejarah, gerakan-gerakan yang belum dikenal sebagai pencak silat terus diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan baru (Maryono, 1998, p. 36).

Penyebutan gerakan-gerakan itu sendiri berbeda di setiap negara. Masyarakat Jawa menyebutnya sebagai pencak saja tanpa silat. Sementara itu, masyarakat Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam menyebutnya silat tanpa pencak. Kata pencak dan silat sebenarnya memiliki arti yang sama. Selain pencak dan silat, dikenal istilah-istilah lain untuk menyebut seni bela diri tersebut, antara lain: gayung, guyong, atau gayuang (Kusuma, 2019, 3).

Silat Melayu berkembang di Indonesia pada masa Kerajaan Majapahit abad XIII samapi XIV. Dalam rangka mempertahankan daerah teritorial serta melakukan ekspansi ke kerajaan-kerajaan lain, Kerajaan yang berpusat di Jawa Timur itu tentu membutuhkan ilmu peperangan dan tentara yang tangguh (Saleh, 1991, p. 18). Begitu pula dengan Kerajaan Sriwijaya yang juga memiliki prajurit tangguh dengan keterampilan seni bela diri. Penanaman jiwa keprajuritan dan kesatriaian selalu diberikan untuk mencapai keunggulan dalam ilmu bela diri. Untuk menjadi prajurit atau pendekar diperlukan syarat-syarat dan latihan yang mendalam di bawah bimbingan seorang guru (Kriswanto, 2015, p. 2).

Pencak silat pada zaman penjajahan Belanda kurang berkembang. Hal itu karena pencak silat dipandang dapat mengancam. Kekhawatiran Belanda membuat pelatihan-pelatihan pencak silat dilarang, sehingga tidak memperlihatkan perkembangan yang baik. Adapun mereka yang bertahan adalah kelompok-kelompok kecil yang berlatih secara sembunyi-sembunyi atau mereka yang hanya melakukan pertunjukan-pertunjukan seni pada acara tertentu (Habibi, 2009, p. 17).

Sementara itu, Militer Jepang mendorong pengembangan pencak silat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pada masa pendudukan Jepang, diadakan pemusatan tenaga aliran pencak silat yang diatur oleh pemerintah. Berdasar pada aturan tersebut, di seluruh Pulau Jawa didirikan perguruan silat secara serentak. Namun demikian, pada masa awal kemerdekaan, perkembangan pencak silat justru menurun. Banyak perguruan silat tidak beroperasi lagi. Hal itu karena banyak tokoh pesilat mengundurkan diri dari dunia persilatan karena kondisi politik dan ekonomi yang tidak menentu. Dengan demikian, pada masa itu terjadi krisis organisasi dalam dunia pencak silat di Indonesia. Pada masa itulah sebagian penggiat pencak silat menginisiasi sebuah organisasi yang mewadahi perguruan-perguruan pencak silat di seluruh Indonesia. Organisasi tersebut bernama Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), didirikan pada 18 Mei 1948.

Pada artikel ini dibahas mengenai peranan IPSI sebagai organisasi nasional pencak silat dalam memajukan dunia pencak silat Indonesia. Perkembangan IPSI telah dilakukan oleh Pratama dan Trilaksana (2018). Ia membahas tentang perkembangan IPSI sejak didirikan pada 1948 hingga 1973. Adapun fokus pembahasannya adalah perkembangan serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi pencak silat, di tengah kemunculan seni bela diri dari luar negeri. salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan standardisasi gerakan dan memasukkan pencak silat dalam kurikulum pendidikan formal mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara itu, kajian ini berfokus pada langkah-langkah yang dilakukan IPSI dalam rangka melestarikan serta melebarkan sayap pencak silat Indonesia ke dunia internasional. Salah satu terobosan besar yang dilakukan IPSI dalam memajukan pencak silat Indonesia adalah pendirian Padepokan Pencak Silat Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah kritis. Metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Dalam metode sejarah ada empat tahapan yang harus dilakukan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 1983, p. 32). Penyusunan artikel ini memanfaatkan sumber-sumber dari koran sezaman yang membahas tentang pencak silat khususnya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh IPSI. Selain itu, artikel ini juga disusun dengan memanfaatkan buku-buku tahunan yang diterbitkan oleh IPSI. Sumber-sumber berupa buku, artikel, dan skripsi juga digunakan untuk memberikan *setting* dan konteks terhadap fakta yang ditemukan.

Perkembangan Pencak Silat sebelum Lahirnya Organisasi Nasional Pencak Silat

Di Indonesia istilah perguruan pencak silat dan aliran pencak silat memiliki arti yang berbeda. Perguruan pencak silat sendiri merupakan lembaga pendidikan yang mendidik, mengajar, serta melakukan praktek pencak silat. Sebagai contoh di Jawa Barat terdapat perguruan pencak silat yang dikenal dengan sebutan *peguron* sedangkan di Jawa Tengah disebut *padepokan*. Sebaliknya, aliran pencak silat adalah sebuah gerakan atau jurus-jurus pencak silat yang memiliki ciri sesuai dengan daerah masing-masing. Namun demikian, istilah pencak silat baru dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak zaman kemerdekaan, sedangkan di masa kerajaan dan masa kolonial, pencak silat lebih dikenal dengan kata pencak atau silat serta kata-kata lain yang sama pengertiannya (Riswanto, 2015, p. 22); (Notosoejitno, p. 4).

Seiring dengan minat masyarakat untuk mempelajari pencak silat, baik secara kelompok maupun perorangan, maka terbentuklah organisasi pencak silat. Kemunculan organisasi pencak silat pertama kali terdapat di Pulau Jawa yang ditandai dengan pendirian sebuah paguyuban pencak silat di Surabaya pada 1903 oleh Ki Ngabehi Surodiwirjo. Selanjutnya, muncul organisasi lain di Desa Winongo, Kabupaten Madiun dengan nama Persaudaraan Setia Hati. Pada saat itu, Ki Surodiwirjo mampu merangkai jurus-jurus pencak silat yang diambil dari berbagai aliran pencak silat di berbagai daerah, seperti: Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatra Barat, dan Aceh. Ki Ngabehi kemudian menggabungkan semua jurus itu sebagai suatu sistem atau metode yang dipergunakan untuk menyusun aliran baru. Aliran itu tidak lain adalah Setia Hati. Secara umum, dapat dikatakan bahwa tidak banyak aliran, kecuali aliran Setia Hati yang telah memberikan pengaruh besar terhadap kemajuan pencak silat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini karena aliran-aliran pencak silat lain hampir tidak menampakkan dirinya secara terbuka, dan hanya ditampilkan pada upacara-upacara keagamaan tertentu. Sebagai contoh adalah di pesantren dan komunitas lain. Sementara itu, Persaudaraan Setia Hati yang berada di bawah pimpinan Ki Ngebehi Surodiwirjo, tersebar di kalangan masyarakat luas diberbagai daerah pada masa penjajahan Belanda yang notabane organisasi pencak silat mendapatkan larangan untuk berkembang (Suronegoro, 1970, p. 3).

Pada 1922, pernah terjadi pembentukan organisasi pencak silat yang berlokasi di Segalaherang, Subang, Jawa Barat bernama Perhimpunan Pencak Silat Indonesia (PPSI). Organisasi tersebut bertujuan untuk mentransformasi pencak silat gaya Jawa Barat yang telah menyebar ke seluruh Kepulauan Indonesia. Selampendudukan Jepang, Soekarno pernah menjadi pelindung asosiasi PPSI. PPSI juga sempat menghentikan aktivitasnya beberapa tahun karena terjadinya pergolakan politik, akan tetapi pada 1950 PPSI yang telah direorganisasi muncul kembali di wilayah residensi di Jawa Barat. Tujuan PPSI pada dasarnya adalah melayani kepentingan umum dan mewujudkan cita-cita bangsa yang telah ditetapkan bersama dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 (UUD '45). Kegiatan PPSI bukan hanya berlatih pencak silat saja, melainkan juga melakukan berbagai kegiatan serta kerja di bidang sosial, ekonomi, dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Maryono, 2002).

Pada masa kependudukan Jepang, perkembangan ilmu bela diri pencak silat mendapatkan ruang yang memadai. Artinya, Jepang menganggap ilmu beladiri pencak silat tidaklah berbahaya. Pemerintah Jepang bahkan memperkenalkan berbagai seni bela diri yang mereka miliki, seperti: judo, ji-jutsu, dan karate. Kebebasan yang diberikan Jepang ini pun di sambut baik oleh bangsa Indonesia terutama oleh para pendekar pencak silat. Hal tersebut dibuktikan dengan pendirian gerakan pencak silat yang diatur oleh pemerintah Jepang secara serentak di seluruh Jawa dan kegiatan dalam gerakan tersebut juga dibebaskan. Gerakan-gerakan pencak silat pada masa Jepang berada di bawah pengawasan *syu-tyookan* dan diatur oleh *Gunseiken* (PB. IPSI, 1953 p. 51)

Kebebasan yang diberikan oleh Pemerintah Jepang tersebut juga membuka kesempatan untuk mendirikan organisasi pencak silat yang bernama Gabungan Pencak Mataram (Gapema). Gapema didirikan pada 1943 oleh R. Broto Soetarjo alias Sutaryo dari Perguruan Budaya Indonesia Mataram, Mohamad Djoemalidari dari Persatuan Pencak Taman Siswa, R. M. Harimurti dari perguruan Krisnamurti, Abdullah dari Pencak Kesehatan, R. Soekirman dari Rukun Kesahatan Badan, Alip Purwowarso dari Setia Hati Organisasi, Suwarno dari Setia Hati Terate, R. Mangkukupujono dari Persatuan Hati, dan R. M. Sunardi Suryodiprojo dari Reti Ati (Setdipuro, 1981).

Pascaproklamasi kemerdekaan, di Indonesia berdiri sebuah organisasi pencak silat yang bernama Gabungan Pentjak Seluruh Indonesia (Gapensi). Gapensi didirikan pada 1947. Organisasi ini memiliki tujuan untuk mempersatukan aliran pencak silat di seluruh Indonesia. Gapensi didirikan oleh Mohamad Djoemali dari Taman Siswa bersama beberapa tokoh pencak silat lain, yaitu: R. M. Soebandiman Dirdjoatmodjo dari Perisai Diri, Ki Widji Hartani dari Perisai Sakti Mataram, R. Broto Soetarjo dari Budaya Indonesia Mataram dan Widjaja. Organisasi yang didirikan di Yogyakarta itu bercita-cita menjadi sebuah organisasi nasional. Namun demikian, pada kenyataannya keanggotaan Gapensi masih berskala lokal, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai organisasi nasional.

Periode Awal Pendirian IPSI sebagai Organisasi Pencak Silat

Beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia muncul perbincangan di berbagai kalangan tokoh pencak silat tentang pembentukan suatu organisasi pencak silat berskala nasional. Pada saat itu pula mulai diinisiasi pemebentukan organisasi nasional pencak silat. Perkembangan organisasi nasional pencak silat memasuki fase penting mulai 18 Mei 1948 yang ditandai dengan penyelenggaraan pertemuan para tokoh pencak silat di Surakarta. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wongsonegoro, Marijun, Paku Alam, serta para pendekar pencak silat yang saat itu memang ingin menghadiri Pekan Olahraga Nasional (PON) 1 di Surakarta yang diselenggarakan pada 1948. Pertemuan itulah yang kemudian melahirkan organisasi nasional pencak silat. Organisasi itu tidak lain adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). Pada 1950, IPSI mulai diakui, baik oleh pemerintah maupun perguruan-perguruan pencak silat di Indonesia. Pengakuan itu ditandai dengan keberhasilan IPSI mengajak tokoh-tokoh pendekar pencak silat dalam Kongres Luar Biasa IPSI di Yogyakarta pada akhir 1950 (Notosoejitno, p. 2).

Langkah pertama yang dilakukan oleh Wongsonegoro bersama staf Pengurus Besar IPSI lain ialah menguatkan keuangan organisasi. Hal itu dilakukan agar IPSI memiliki modal untuk membiayai seluruh keperluan kegiatan. Pada 23 Desember 1950, diselenggarakan kongres pertama IPSI di Yogyakarta. Kongres hanya membahas tentang cara mendapatkan pendanaan yang besar dan cepat untuk mendukung kegiatan-kegiatan awal. Oleh karena itu, dibentuk sebuah panitia kecil untuk mengajukan permohonan subsidi kepada pemerintah (PB IPSI, p. 59).

Pada Maret 1951, organisasi ini mendapat bantuan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K). Selanjutnya, dana itu dimanfaatkan untuk mendukung penyusunan buku Kongres I IPSI. Buku yang digunakan sebagai bahan bacaan anggota IPSI itu ditulis oleh Soertadjo. Penyebaran buku oleh IPSI Pusat ke berbagai cabang-cabang IPSI di daerah-daerah Indonesia, merupakan upaya awal untuk menguatkan keorganisasian IPSI, sekaligus mengembangkan pencak

silat di Indonesia. Pada 1955, IPSI mampu memperkenalkan pencak silat hingga mancanegara. Hal itu dilakukan melalui salah satu program pemerintah dalam misi memperkenalkan kebudayaan Indonesia di berbagai negara, seperti: Polandia, Leningrad, Hongaria, dan Kairo (PB IPSI, p. 12).

Pada 1960-an, IPSI dilanda beberapa permasalahan yang menyebabkan ketidakstabilan. Hal itu karena di Indonesia pencak silat mempunyai gerakan dan aliran yang beranekaragam. Jumlah perguruan pencak silat di penjuru tanah air diperkirakan sampai ribuan, sehingga tidak mudah bagi IPSI untuk mewujudkan persatuan atau kesatuan antarperguruan di dalam satu wadah induk organisasi nasional tunggal pencak silat (PB, IPSI, p. 14). Meyakinkan perguruan-perguruan pencak silat di Indonesia bahwa pencak silat dapat dipertandingkan sebagai cabang olahraga prestasi tentu menjadi pekerjaan yang cukup berat. Hal itu karena IPSI harus "bertarung" dengan perguruan-perguruan konservatif yang tidak ingin melihat pencak silat sebagai ajang yang dipertandingkan.

Persoalan itu membuat perkembangan pencak silat pada 1960-an mengalami keterlambatan. Selain karena perbedaan persepsi antara IPSI dan perguruan-perguruan pencak silat di daerah-daerah, keterlambatan kemajuan pencak silat juga disebabkan oleh kondisi politik di Indonesia yang saat itu memang sedang bergolak, sehingga terjadi penundaan untuk memasukan pencak silat sebagai cabang olahraga prestasi di Pekan Olahraga Nasional (PON) ("Ikatan Pencak Silat Indonesia," t.t., p. 3).

Pada 1970, ketika keadaan politik di Indonesia mulai membaik, persoalan-persoalan tersebut perlahan-lahan dapat diatasi. Perguruan-perguruan juga mulai menerima pencak silat sebagai olahraga bela diri yang dipertandingkan. Sejak saat itu pula, usaha-usaha ke arah pengembangan dimulai. Alhasil, pada 1971, bersamaan dengan pelaksanaan Musyawarah Kerja (Musker) IPSI, ditetapkan pula beberapa keputusan penting mengenai perumusan peraturan pertandingan, wasit-wasit, sarana-sarana, dan lain-lain. Berkaitan dengan perwasitan, telah dilakukan penataran wasit dan juri pada 10 hingga 15 Agustus 1972 yang diikuti oleh beberapa Komisi Daerah (Komda) IPSI, baik dari Jawa maupun luar Jawa, yang meliputi Jakarta Raya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogjakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Selanjutnya, pada kongres IPSI ke IV yang diselenggarakan pada Januari 1973, disahkan rancangan peraturan pertandingan nasional, yang kemudian dibagikan ke berbagai cabang IPSI di daerah-daerah untuk persiapan PON VIII.

Pada Musker itu, PB IPSI juga melakukan beberapa rangkaian kegiatan pendekatan kepada pengurus IPSI di daerah, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, KONI Daerah, pemerintah, dan tokoh masyarakat untuk menyosialisasikan dan melestarikan pencak silat ("33 tahun IPSI Akhirnya Pengertian Olahraga Berhasil Mengikat Mereka," 1981). Dalam rangka memasukkan pencak silat sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di PON, IPSI meminta dukungan kepada Gubernur Ali Sadikin ("Olahraga, dalam Meng-cover PON VIII Para Wartawan Diharap Bersikap Netral", 1973, p. 10).

Pada 1973, berlangsung PON VIII di Jakarta. Pada tahun itu untuk kali pertama pencak silat dipertandingkan dalam PON. Pertandingan pencak silat pertama diselenggarakan di Gelanggang Olahraga Jakarta Utara pada 7-13 Agustus 1973. Pertandingan tersebut diikuti oleh 15 daerah, antara lain: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Maluku. Kemunculan pencak silat sebagai cabang olahraga prestasi di PON 1973, telah berdampak baik terhadap perkembangan pencak silat pada periode selanjutnya (Wawancara, H. Harsoyo, 26 Juli 2017).

Selama 25 tahun, IPSI merintis organisasi pencak silat nasional dan telah banyak perubahan yang dibawa. Tujuan dan visi serta misi organisasi dijadikan sebagai pedoman organisasi, agar pencak silat tetap lestari sebagai bela diri asli yang dimainkan oleh masyarakat Indonesia. Pada 29 Januari 1973, IPSI mengadakan kongres ke-4 di Jakarta dengan menyongsong tema "Tingkatkan Pembinaan Organisasi dan Prestasi". Dalam kongres tersebut, masalah yang dibahas selain anggaran dasar adalah pemilihan pengurus baru. Setelah melakukan musyawarah bersama,

diputuskan bahwa Wongsonegoro yang saat itu menjabat sebagai ketua digantikan oleh Tjokropranolo. Tjokropranolo dipilih karena memiliki pribadi yang tegas. Ia juga dianggap sebagai orang berpengaruh karena selain seorang anggota Angkatan Bersenjata berpangkat Brigadir Jenderal, ia juga adalah Gubernur Jakarta. Kehadiran Tjokropranolo diharapkan dapat membawa IPSI ke arah kemajuan ("Presiden: Para Pendekar Pencak Silat Harus Lapang Dada," 1973, p. 10).

Setelah Kongres IV berlangsung, dan Tjokropranolo terpilih sebagai Ketua Umum PB IPSI, kabar baik datang dari Jawa Barat. Sesuai dengan permintaan KONI Jawa Barat, organisasi-organisasi pencak silat di wilayah Jawa Barat yang diorganisasi oleh PPSI dinyatakan meleburkan diri ke tubuh IPSI. Peleburan itu tercermin dalam pembentukan Komda IPSI Jawa Barat yang dipimpin oleh Suhari Sapari ("PPSI Jabar Menggabung IPSI", 1973, p. 10).

Penggabungan PPSI ke dalam wadah IPSI memang tidak dipungkiri berkat usaha Tjokropranolo dalam melakukan pendekatan dengan PPSI. Pendekatan itu berhasil salah satunya karena Tjokropranolo masih satu korps polisi militer dengan para pemimpin PPSI. Pendekatan dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Berdasar pada pertimbangan tersebut, PPSI akhirnya setuju untuk berintegrasi ke dalam IPSI. Bergabungnya PPSI ke dalam IPSI juga menandakan akhir dualisme antarorganisasi pencak silat yang sangat berpengaruh di Indonesia.

Tidak hanya itu, di masa kepemimpinan Tjokropranolo usaha untuk mewujudkan pertandingan nasional juga terwujud, terbukti dengan penyelenggaraan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) pertama pencak silat di Semarang pada 27 April-1 Mei 1975. Pertandingan ini pun dikenal dengan sebutan Kejuaraan Nasional Pencak Silat Dewasa I. Kejurnas tersebut diikuti oleh 18 daerah yang terdiri atas: Aceh, Bali, Yogyakarta, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, NTB, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah sebagai tuan rumah. Total peserta yang turut memeriahkan kejurnas adalah 141, yang terdiri atas 106 atlet putra dan 35 atlet putri ("Sejarah Perkembangan Olahraga Pencak Silat di Indonesia," 1984, p. 17).

Pada 1976, Kejurnas Dewasa II berlangsung di Jakarta yang diikuti oleh 22 daerah dengan total peserta sebanyak 203, terdiri atas 140 atlet putra dan 63 orang atlet putri. Kejurnas Dewasa III diselenggarakan pada 1979 dan diikuti oleh 23 daerah. Adapun jumlah peserta yang bertanding adalah 204 orang, yang terdiri atas 158 atlet putra dan 46 atlet putri. Sehubungan dengan minat masyarakat Indonesia terhadap pencak silat yang terus meningkat, pada 1978 diadakan Kejurnas Remaja I, disusul Kejurnas Remaja II pada 1980, dan Kejurnas Remaja III pada 1982. Ketiganya diikuti oleh 23 daerah. Barulah pada 1984 daerah yang berpartisipasi dalam kejurnas bertambah, yaitu menjadi 27 ("Provinsi Ikuti Kejurnas Pencak Silat," 1983). Kejuaraan yang diselenggarakan IPSI terbukti berhasil. Hal itu ditandai dengan minat perguruan-perguruan pencak silat di Indonesia untuk mengikuti kejuaraan nasional (Kejurnas) yang terus meningkat. Beberapa Kejurnas yang diselenggarakan oleh IPSI juga telah melahirkan atlet-atlet terbaik yang dalam perkembangan selanjutnya mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Masa Keemasan IPSI: Invitasi dan Festival Internasional

Masa keemasan IPSI dimulai pada era kepemimpinan Eddie Nalapraya. Pada saat Tjokropranolo masih menjabat sebagai Ketua Umum PB IPSI, Eddie Nalapraya diutus untuk mengatasi masalah penundaan pembentukan organisasi pencak silat internasional oleh Malaysia. Tjokropranolo percaya bahwa Eddie Nalapraya mampu mengatasi masalah tersebut berbekal pengalamannya selama memimpin IPSI Jakarta. Tjokropranolo juga meminta Eddie Nalapraya menjadi Ketua Harian IPSI Pusat, menggantikan Djadjang Djadjaatmaja yang membutuhkan istirahat karena kesehatannya menurun (Permadi, 2013, pp. 44-51).

Pemberian mandat kepada Eddie Nalapraya rupanya membawa hasil yang baik dalam kemajuan pencak silat, baik di Indonesia maupun mancanegara. Hal tersebut dilihat dari keberhasilan Eddie Nalapraya dalam membentuk Persatuan Pencak Silat Antar Bangsa (Persilat),

sebuah organisasi pencak silat Internasional pada 1980 yang dipelopori oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Semua negara itu termasuk dalam The Founding Member (anggota pendiri) (Constitution of the Internasional Pencak Silat Federation, 1997, p. 4).

Dalam perkembangannya, Persilat mampu menyelenggarakan pertandingan bertaraf internasional untuk pertama kalinya dalam sejarah pertandingan pencak silat. Pada 1982, IPSI bersama Persilat menyelenggarakan dua kegiatan internasional pencak silat di dua kota, yaitu Cirebon dan Jakarta pada awal Agustus. Kegiatan pertama diselenggarakan pada 2-4 Agustus berupa festival pencak silat internasional di Cirebon dan yang kedua investasi internasional pencak silat di Jakarta pada 7-8 Agustus ("Pesilat Tujuh Negara Ikuti Festival dan Investasi," 1982).

Kegiatan internasional yang berlangsung di dua kota tersebut diberi nama Prasetya Mulya I 1982. Prasetya Mulya I 1982 diikuti oleh tujuh Negara dengan 169 atlet ("Pertama Kalinya Diadakan Di Dunia: Invitasi Pencak Silat Prasetya Mulya I Jakarta Diikuti 7 Negara," 1982). Ke tujuh negara itu terdiri atas Indonesia (35 orang), Malaysia (33 orang), Singapura (51 orang), Belanda (31 orang), Jerman (10 orang), Amerika Serikat (7 orang), dan Australia (dua orang) ("Pesilat 2 AS, Jerman, & Australia Turut Invitasi Internasional," 1982).

Kegiatan invitasi dan festival pencak silat internasional itu berjalan dengan baik dan mampu mengangkat pencak silat Indonesia di level internasional. Hal tersebut ditandai dengan perhatian pemerintah yang diwakili oleh Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga (PLSPO) Departemen P dan K, W. P. Napitulu. Ia menyampaikan harapan bahwa festival dapat meningkatkan semangat pemuda Indonesia agar terus melestarikan pencak silat. Ia menyampaikan pidato di hadapan para penonton yang sebagian besar merupakan pelajar. Ia juga menekankan bahwa pencak silat merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai keluhuran. Berdasar pada pertimbangan tersebut, pencak silat kemudian mulai diajarkan di sekolah, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA). Hal itu sebagaimana dianjurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada kongres IPSI ke IV ("Pencak Silat Perlu Diajarkan di SD," 1982).

Tidak hanya dari dalam negeri, pencak silat juga berkembang di luar negeri. Salah satunya adalah di Australia. Pencak silat di Australia dikembangkan oleh John Will. Setelah memenangkan kejuaraan internasional, John Will mendirikan sebuah perguruan pencak silat bernama Pencak Silat Bhakti Negara cabang Negeri Kanguru. Ia mengajarkan pencak silat sebagaimana yang diajarkan di Indonesia, namun dengan bantuan beberapa peralatan modern, seperti *videotape* dan *biofeedback* ("John Will Kembangkan Pencak Silat di Australia," 1982).

Keberhasilan IPSI dan Persilat dalam menyelenggarakan kegiatan internasional ternyata terus berlanjut. Pada 1984, IPSI dan Persilat kembali membuat invitasi dan festival pencak silat internasional tepatnya pada 25-29 November 1984 di Jakarta. Kegiatan tersebut diikuti oleh 13 negara, yaitu: Amerika Serikat, Austria, Belanda, Jerman Barat, Yugoslavia, Malaysia, Perancis, Spanyol, Singapura, Suriname, Swiss, Turki, dan Indonesia.

Dua tahun kemudian, kegiatan invitasi dan festival pencak silat internasional diselenggarakan kembali. Jika dua festival sebelumnya diselenggarakan di Jakarta, festival 1986 diselenggarakan di Eropa. Hal itu tentu menjadikan festival yang diselenggarakan pada 29 Juli 1986 istimewa. Keberhasilan IPSI dan Persilat bukan hanya dilihat dari kegiatan yang diselenggarakan melainkan juga perkembangan pencak silat di berbagai negara. Perkembangan itu terlihat dari penampilan para peserta. Belanda misalnya, yang memunculkan satu karya koreografi yang ditata dengan apik, baik dari segi gerak maupun musik pengiring. Selain menunjukkan perkembangan yang baik, juga menunjukkan kekayaan intelektual kebudayaan pencak silat. Perkembangan itu membuktikan bahwa pencak silat yang merupakan kebudayaan asli Melayu ternyata dapat berkembang di banyak negara dan dalam prosesnya bahkan tercipta akulturasi ("Invitasi Pencak Silat Internasional Diikuti 13 Negara," 1986).

Peran IPSI sebagai pelopor kejuaraan internasional dari tahun ke tahun dapat disimpulkan berjalan dengan baik. Salah satu indikatornya adalah karena pencak silat tidak hanya dimainkan

oleh Bangsa Melayu, melainkan bangsa lain. Para pesilat dari luar negeri bahkan rela berkunjung ke Indonesia untuk memperdalam pencak silat.

Puncak keemasan pencak silat yang dilakukan IPSI juga ditandai dengan pendirian padepokan pencak silat berskala nasional bernama Padepokan Pencak Silat Indoensia (PPSI). Pada 1988, PB IPSI mengalami kesulitan dana. Beruntung pada saat itu datang tiga pecinta pencak silat. Mereka adalah Bambang Triatmojo, Rosano Barack, dan Prabowo Subianto. Ketiganya menawarkan bantuan kepada IPSI. Bantuan yang ditawarkan ternyata bukan hanya meliputi dana saja, tetapi juga usaha untuk membangun sebuah padepokan pencak silat. Pada 1990, diputuskan bahwa letak padepokan adalah di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan luas lahan 5,2 hektar. Tanah tersebut merupakan pemberian Tien Soeharto selaku ketua Yayasan Purna Bhakti Pertiwi yang merupakan yayasan pendiri, pemilik, dan pengelola TMII.

Tidak lama setelah ide dan gagasan pembangunan padepokan pencak silat disetujui ibu Tien Soeharto, Rosano Barack dan Prabowo Subianto berkeliling menemui rekan-rekan pengusaha agar turut membantu juga. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Tercatat sebanyak 30 pengusaha dan perusahaan turut serta iuran untuk membangun padepokan yang menghabiskan dana sebanyak 31 milyar. Pada 1993, proses pembangunan dimulai. Awal pembangunan padepokan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djonegoro dan Menteri Pemuda dan Olahraga Haono Isman. Selain itu, hadir pula tokoh-tokoh nasional lain, seperti Akbar Tanjung dan tentunya Ketua Umum KONI Pusat Surono (Putra, 2008, p. 96). Ungkapan kebahagiaan juga dirasakan oleh ratusan pesilat muda, baik putra maupun putri yang menunjukkan wajah antusias di kompleks TMII ("Padepokan Nasional Pencak Silat Indonesia: Langkah Awal Untuk Memuliakan Silat," 1993). Menurut Eddie Nalapraya, keberhasilan pembangunan padepokan terjadi bukan hanya karena bantuan dana dari para pengusaha dan kolega-koleganya, melainkan karena kecintaan masyarakat terhadap pencak silat.

Pada 20 April 1997, padepokan yang sudah diimpikan oleh para pecinta pencak silat itu diresmikan. Peresmian PPSI bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) TMII yang ke-22. Presiden Soeharto sendiri selaku Pembina Utama IPSI yang meresmikan PPSI dengan menandatangani surat naskah serah terima ("Naskah Serah Terima Bambang Triatmojo kepada Soeharto," 1997, p. 133). Peresmian PPSI ternyata bergema ke seluruh penjuru, hingga ke luar negeri. Pendirian PPSI telah menjadi kabar gembira bagi para pencinta pencak silat. Dengan pendirian PPSI, berarti kegiatan-kegiatan pencak silat dapat lebih terpusat.

Pendirian PPSI diharapkan dapat memotivasi para pemain pencak silat untuk terus berlatih serta menarik orang-orang yang belum pernah berlatih. Pendirian PPSI juga sebagai ajang unjuk diri, bawa pencak silat adalah olahraga kebanggaan nasional dan tentunya akan terus berprestasi di dunia internasional. PPSI sendiri mempunyai lima visi dan misi yang tergabung dalam satu kesatuan, yaitu menjadi pusat informasi, presentasi, representasi, edukasi, dan promosi.

Simpulan

Kepemimpinan adalah faktor utama yang menyebabkan IPSI mampu berkembang sebagai induk organisasi pencak silat. Pada gilirannya, IPSI memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan pencak silat, baik di Indonesia maupun mancanegara. Selama 1948 hingga 1997 IPSI sudah beberapa kali berganti pemimpin, mulai dari Mr. Wongsonegoro, Tjokropranolo, hingga Eddie Marzuki Nalapraya. Perkembangan pencak silat baik di Indonesia maupun mancanegara sangat bergantung pada peranan para pemimpin IPSI yang terus memberikan semangat dan dedikasi tinggi. Gaya kepemimpinan para pemimpin IPSI yang berbeda-beda dari masa ke masa telah mampu memajukan dunia persilatan. Selain itu, setiap pemimpin juga memiliki jiwa zaman masing-masing yang memengaruhi perkembangan pencak silat. Jika dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa IPSI merupakan pelopor pengembangan organisasi pencak silat di Indonesia.

Referensi

- 27 provinsi ikuti kejurnas pencak silat. (11 September 1983). *Sinar Harapan*.
- 33 tahun IPSI akhirnya pengertian olahraga berhasil mengikat mereka. (7 Mei 1981). *Kompas*.
- Gottschalk, Louis. (1983). *Mengerti sejarah* (Nugroho Notosusanto, Trans). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Groot, George & Notosoejitno. (2006). *Pencak silat seni bela diri Indonesia Jilid I*. Bandung: PT. Granesia.
- Habibi, A. (2000). *Sejarah pencak silat Indonesia (Studi historis perkembangan Persaudaraan Setia Hati Terate di Madiun Periode tahun 1922-2000)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia).
- Invitasi pencak silat internasional diikuti 13 negara. (1 Agustus 1986). *Kompas*.
- John Will kembangkan pencak silat di Australia. (5 Agustus 1982). *Kompas*.
- Kriswanto, E. S. (2015). *Pencak Silat*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Kriswanto, E. S. (2015). *Pencak Silat*. Yogyakarta: Pustaka Batu Press.
- Kusuma, I. T. (2019). *Organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia Hari Terate cabang Kendal 1982-2016* (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia).
- Maryono, O. (1998). *Pencak Silat merentang waktu*. Yogyakarta: Pustaka
- Naskah Serah Terima Bambang Triahatmojo kepada Soeharto, Arsip PB PPSI tahun 1997.
- Notosoejitno. (1997). *Kelahiran dan perkembangan IPSI*. Jakarta: Graha Pustaka Padepokan Pencak Silat Indonesia.
- Notosoejitno. (n. d.). *Ontologi pencak silat*. Jakarta: Pondok Pustaka Padepokan PencakSilat Indonesia.
- Olahraga, dalam meng-cover PON VIII para wartawan diharap bersikap netral. (4 Agustus 1973). *Kompas*.
- Padepokan nasional pencak silat Indonesia: Langkah awal untuk memuliakan silat. (28 November 1993). *Kompas*.
- PB IPSI (1953). *Pentjak Silat Indonesia*. Jogjakarta: Panitia Penerbitan Buku Kenang-kenangan Kongres IPSI II.
- PB IPSI (1981). *Pelestarian dan pengembangan Pencak Silat sebagai Budaya Bangsa*. Jakarta: PB IPSI.
- PB IPSI (1984). Sejarah perkembangan olahraga Pencak Silat di Indonesia. Makalah yang disampaikan dalam acara sarasehan pencak silat yang dilaksanakan oleh KPS Nusantara 24-26 Agustus 1984 di Jakarta.
- PB IPSI (n. d.). *Sejarah pencak silat Indonesia*, Jakarta: Pondok Pustaka PPSI.
- Pencak silat perlu diajarkan di SD. (5 Agustus 1982). *Berita Buana*.
- Permadi, A. C. (2013). *Peranan Eddie Marzuki Nalapraya dalam Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dari local ke internasional (1978-2003)* (Skripsi). Universitas Indonesia.
- Persilat (Juni 1997). *Constitution of the International Pencak Silat Federation*. Jakarta.
- Pertama kalinya diadakan di dunia: Invitasi Pencak Silat Prasetya Mulya I Jakarta diikuti 7 negara. (31 Juli 1982). *Sinar Pagi*.
- Pesilat AS, Jerman, & Australia turut invitasi internasional. (31 Juli 1982). *Harian Terbit*.
- Pesilat tujuh negara ikuti festival dan investasi. (31 Juli 1982). *Kompas*.
- PPSI Jabar menggabung IPSI. (27 Januari 1973). *Kompas*.
- Pratama, R. Y. & Trilaksana, A. (2018). Perkembangan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Tahun 1948-1973. *AVATARA*, 6(3), 108-117.
- Presiden: para pendekar pencak silat harus lapang dada. (27 Januari 1973). *Kompas*.
- Putra, F. W. (2018). *Legenda tokoh pencak silat Indonesia Eddie Nalapraya, Mayor Jenderal TNI*, Purn. Yogyakarta: LPPM UNY.

Rachmat, S. (1970). *Sejarah pencak silat Indonesia dan IPSI*. Jakarta: PB IPSI.

Saleh, M. (1991). *Pencak silat: Sejarah perkembangan, empat aspek*,

Setdipuro, Suwandi. batlyon pesilat memang pernah terbentuk di Yogyakarta. (7 Mei 1981).
Kedaulatan Rakyat.